

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permbangunan ekonomi merupakan tujuan utama negara-negara sedang berkembang (NSB). Keberhasilan kinerja pemerintah dan lembaganya cenderung diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan (Grossman, 2001: 6). Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam menilai suatu negara itu berhasil atau tidak dalam pembangunannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan kenaikan atau peningkatan produksi barang dan jasa dan dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa di antaranya investasi, teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan (Sukirno, 2008). Tetapi dalam beberapa kasus sebagian besar peneliti belum melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh korupsi. Korupsi merupakan dampak sosial yang perlu diteliti karena dengan adanya korupsi pertumbuhan ekonomi dapat terpengaruh, kebijakan untuk menangani korupsi berpengaruh negatif tergantung dari setiap negara.

Dalam memandang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi Huntington (1968), berpendapat bahwa korupsi akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempercepat birokrasi sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Korupsi dapat berjalan secara efisien kalau korupsi dijalankan di negara-negara yang mempunyai birokrasi yang sangat rumit.

Pendapat lain datang dari Blackburn dkk (2005: 1-7) bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan.

Korupsi yang terjadi saat ini beraneka ragam mulai dari skala yang besar maupun skala yang kecil, mulai dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi misalnya dapat

menyebabkan suatu kebijakan ekonomi yang seharusnya tepat sasaran menjadi tidak tepat sasaran yang akibatnya menjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat dilihat dari sisi ekonomi dalam hal ini korupsi menghabiskan uang negara, menghambat pembangunan dan membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga kesejahteraan sosial tidak dapat maksimal, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi investasi (<http://www.transparency.org>).

Penelitian ini difokuskan pada sembilan negara Asia yaitu: Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea selatan, Hongkong, Jepang dan China. Negara-negara tersebut pernah mengalami krisis pada tahun 1997. Banyak peneliti yang meneliti hubungan korupsi dengan krisis moneter pada tahun 1997. Hadiwinata (2002: 193) menyebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab krisis moneter yang terjadi. Hal itu terjadi karena banyak pengusaha yang masuk ke dunia bisnis tetapi mereka tidak mempunyai bakat untuk bisnis namun mereka mempunyai hubungan khusus dengan elit dan penguasa. Kondisi ini memunculkan banyak “biaya siluman” yang menyebabkan ketidakpastian investasi. Tetapi hal tersebut tidak banyak ditanggapi oleh pemerintah pemerintah di negara-negara Asia.

Tabel 1.1

Indeks Persepsi Korupsi Sembilan Negara Asia

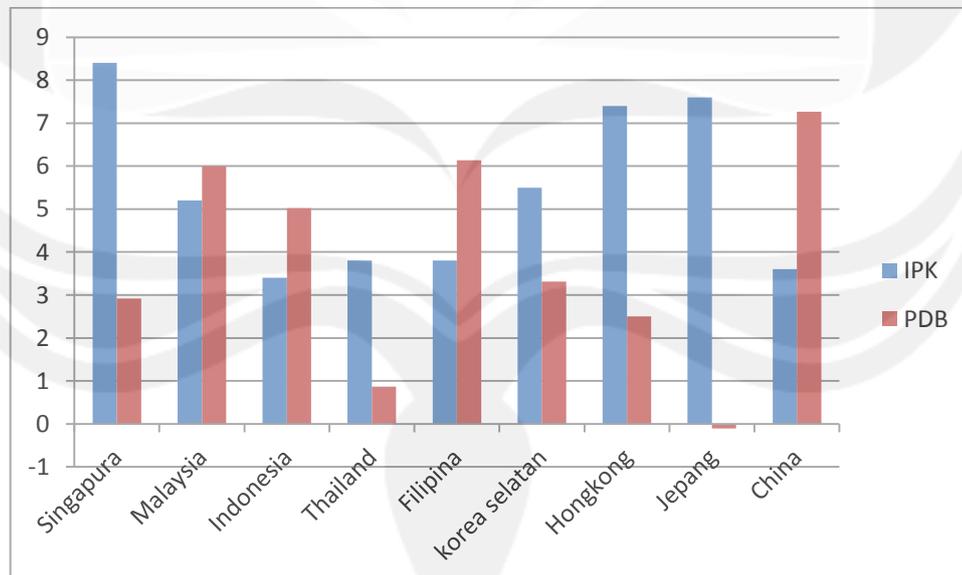
Negara	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Singapura	9.2	8.7	8.6	8.4
Malaysia	4.3	4,9	5	5,2
Indonesia	3	3,2	3,2	3,4
Thailand	3.4	3,7	3,5	3,8
Filipina	2.6	3,4	3,6	3,8
Korsel	5.4	5.6	5.5	5.5
Hongkong	8.4	7.7	7.5	7.4
Jepang	8	7.4	7.4	7.6
China	3.6	3.9	4	3.6

Sumber : *Transparency International*

Tingkat korupsi di suatu negara dapat diukur dari tingkat persepsi korupsi sebagaimana dilakukan oleh *Transparency International* (TI). Lembaga ini mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari angka 1–10; semakin mendekati 10 maka korupsi di negara tersebut semakin kecil. Pada tahun 2014 IPK Indonesia adalah 3,4 yang berarti bahwa korupsi di Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia yang lain. IPK Singapura pada tahun 2014 adalah 8,4 sehingga Singapura merupakan negara dengan tingkat korupsi paling rendah.

Bila korupsi dianggap dapat menghambat perkembangan ekonomi maka negara-negara dengan IPK yang tinggi berpotensi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa suatu negara yang mempunyai tingkat korupsi yang rendah tidak selalu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh adalah Jepang dan Singapura yang mempunyai IPK yang tinggi atau mempunyai tingkat korupsi yang rendah, tetapi pertumbuhannya rendah.

Gambar 1.2



Sumber : IPK (*Transparency International*) dan PDB (*World Bank*), 2014

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Memberi informasi kepada peneliti bagaimana korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia.

1.5 Hipotesis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

H₀: Korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁: Korupsi tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan sistematika penulisan dari skripsi sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan studi terkait terutama hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, dan uji-uji yang akan digunakan dalam penelitian serta definisi operasional.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil perhitungan dari analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran terhadap penelitian.